



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL MUSHAWWIR SAM**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **721121**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.125.000.000

1. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/286 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000

1. MOBIL, HONDA S FRED / MINI BUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B6H-F A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 30.320.159**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.317.320.159**III. HUTANG** Rp. 671.967.028**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 645.353.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.